

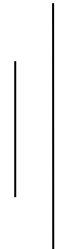


**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KE WEBSITE LAMAN  
JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM**

NOMOR : 09 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 Maret 2023




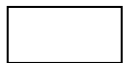
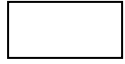
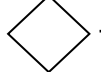


**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  
TAHUN 2023**

 <p style="text-align: center;">SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT</p>	Nomor SOP	:	09 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	:	5 Maret 2023
	Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,  MARKURIUS
	Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KE WEBSITE JDIH
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2.	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun	3.	Memahami alur pengungkahan Produk Hukum;
		4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

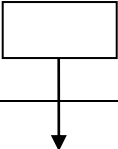
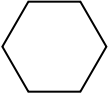
	<p>2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota</p> <p>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> <li>6.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;</li> <li>2. SOP Tata Usaha Pimpinan;</li> <li>3. SOP Penyusunan Keputusan KPU;</li> <li>4. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU;</li> <li>5. SOP Tata Usaha Biro Umum;</li> <li>6. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> <li>5.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku Agenda;</li> <li>2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner;</li> <li>3. Flashdisk dan Map Ordner;</li> <li>4. Stempel Salinan;</li> <li>5. Cap Dinas.</li> </ol>

PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
	Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> ).

**FLOWCHARD PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH**

NO.	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Sekretaris	Kasubag Hukum	Pengelola JDIH	Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Website JDIH berupa Naskah Asli ( <i>Hardcopy</i> ) yang telah Ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU							Nota Dinas	File asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan produk hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Website JDIH. b. Menyampaikan lembar Disposisi							Scan Produk Hukum	File Asli dan Salinan Produk Hukum
3.	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat							Lembar Disposisi	
4.	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat di Website JDIH							Lembar Persetujuan	Persetujuan File sesuai dengan Asli
5.	Melakukan Scan Produk Hukum							Lembar Disposisi	File asli



6.	Cek Kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi							Dokumentasi Hasil Scan	
7.	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH							Form Persetujuan yang telah Ditandatangani Kasubbag Hukum	Tampil di halaman Website JDIH

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan prosedur pengunggahan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Barat ke website laman jaringan dokumentasi informasi hukum;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Tulang Bawang Barat

Pada tanggal 5 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,



★  
MARKURIUS